

1	2	3	4	5	6
5.	Pengujian mutu pangan segar layak konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b</li> <li>- Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	HAKI terjaga	Sampai dikeluarkan hasil akhir akhir (resmi)
6.	Daftar Usulan Sertifikasi Mutu Benih	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mempengaruhi Nilai Ekonomis	Nilai Ekonomis terjaga	Sampai proses pemberian sertifikasi selesai
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
1.	Data tes potensi/ kompetensi PNS/ pejabat yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf d dan Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h dan huruf i;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Mengganggu rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga rahasia pribadi seseorang</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		- Peraturan kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Bagian IV. Pelaporan dan Evaluasi angka 1 huruf b.			
2.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal Pasal 17 huruf h;	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum	Tidak terbatas
		- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  - Perka BKN No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Menjaga rahasia pribadi seorang PNS	
3.	Resume dan notulen rapat Tim pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin PNS	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum	Selama masih berlaku

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin</li> <li>- Pegawai Negeri Sipil; Perka BKN No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> </ul>	
4.	Surat Keputusan hukuman disiplin PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>- PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>- Perka BKN No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum</li> <li>- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> </ul>	Tidak terbatas
5.	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan terbit Surat Keputusan pengangkatan CPNS/PNS yang bersangkutan

1	2	3	4	5	6
6.	Dokumen pertimbangan/ rekomendasi tim penilai kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal Pasal 17 huruf i dan huruf j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai hasil Tim Penilai Kinerja ditindaklanjuti
7.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
8.	Daftar Pejabat yang akan dilantik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan
9.	Keputusan pemberian/ penolakan izin perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal Pasal 17 huruf h, i dan j;</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang



1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990;</li> <li>- Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>			
10.	Arsip data perseorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS
11.	Proses pemberian / penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang.	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang.

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990;</li> <li>- Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar</li> </ul>		
12.	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dan notulensi hasil rapat Tim Pansel (untuk pergeseran / mutasi)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati
13.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi
14.	Dokumen dalam bentuk fisik dan/atau softcopy dan Surat Keputusan pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf d dan Pasal 17 huruf h dan huruf i;</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

1	2	3	4	5	6
		- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h dan huruf i;			
15.	Dokumen pengelolaan kepegawaian (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
DINAS KEPEMUDAAN , OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
1.	Hasil tes kemampuan fisik atlet	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada izin yang bersangkutan
2.	Tes seleksi Paskibra	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada hasil pengumuman